

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010).
- Aditya Rizky, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: CV. Media Edukasi Creative, 2023).
- Agus Wibowo dkk., *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2022).
- Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2022).
- Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Dharma Setiawan, *Holding Investasi dan Holding Operasional dalam Tata Kelola BUMN: Perspektif UU No. 1 Tahun 2025*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2025).

Eddy Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2025).

Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, cet 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2016).

EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

Gagasan Hans Kelsen yakni *The Stufenbau theory* yang ditulis dalam tulisannya *Reine Rechtslehre* (Teori Hukum Murni).

Haswandi, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KENCANA, 2023).

Hendra Setiawan Beon, “Bianglala Business Judgement Rule” (Jakarta: PT Tanusa, 2008).

Hendra Setiawan Boen, “Bianglala Business Judgement Rule”, (Jakarta: PT Tanusa, 2008).

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020).

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 192-196

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011).
- Pidato Bung Karno, “Lahirnya Pancasila”.
- R. Ibrahim, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, edisi revisi, 2009).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius. *Hukum Pidana*, Terj. Sahetapy, cetakan 1 (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).
- Sudarto. *Hukum Pidana I* Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 48.
- Sugeng dan Annisa, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021).
- Suteki dan Galang, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023).

Teuku Syahrul Ansari, *Membangun Business Judgement Rule pada Badan Usaha Milik Negara (Persero) dalam Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kompas).

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada).

Wawan Zulmawan, *Business Judgement Rule Pasca UUI/2025*, (Penerbit: Jala Permata Aksara, 2025).

Disertasi Doktor

Selamat Lumban Gaol, "Rekonstruksi Regulasi Business Judgement Rule sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis yang Menimbulkan Kerugian bagi Perseroan Terbatas berbasis Nilai Keadilan" (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

Artikel Jurnal Ilmiah

Agustinus dan Gunawan, "Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Badan Hukum Baru dalam Investasi BUMN di Era UU No. 1 Tahun 2025," *Netizen: journal of society and bussiness*. Vol. 1 No. 9 (Agustusn 2025)
<https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1630368>

Al Hamid, Rizal, and K. Kunci. "Paradigm of Pancasila Economic as The Identity of Indonesia Nation." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4.1 (2022).

Antonius Alijoyo, "BUMN Indonesia – Penerapan Manajemen Risiko berbasis Peraturan Menteri BUMN No: 5/MBU/09/2022

Ardiyana, Fakhrol, Riski Ari Wibowo, and Afandono Cahyo Putranto. "Politik Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terkait

Ketentuan yang Memisahkan Kerugian pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dan Kerugian Badan Usaha Milik Negara sebagai Kerugian Negara." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2.10 (2025).

Bawazier, Fuad. "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 3, No.2 (2017): 235-243.

Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, *Menggagas Perubahan Undang-Undang PTPK: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2019.

Commite on Corporate Laws. "Corporate Director's Guidebook" *In banking and Business Law. American Bar Assocation.* (1978).

Eunike Graciella, Ariawan Gunadi, "Penggunaan Doktrin Business Judgement Rule dalam Hukum Perusahaan di Indonesia" *Educational Journal History and Humanities*, (2025): <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.51022>.

Florentinus Sudirman, "Mencegah Korupsi di Daerah dengan Pengawasan oleh Kejati", *Jurnal Legalitas/* Vol. 2, No.1, (Juni 2017): <https://doi.org/10.31293/lg.v2i1.2847>.

Gatot Triyanto, "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.

Gerard dan Emily, "The Business Judgement Rule," *Michigan Bar Journal.*, (2020).

- Hasan, Rizkiyawan. "Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia : Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.10 (2024): <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.812>.
- Jati, Agustinus Nugroho, Gunawan Widjaja, and Dyah Ersita Yustanti. "Prinsip Tata Kelola dan Perubahan Paradigma Pengelolaan BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025." *Netizen: Journal of Society and Business* 1.9 (2025).
- Kartika, Nidia Yustisia, Muhammad Bilal Prasetyo, and Mustofa Ponco Wibowo. "Urgensi dan Tata Kelola Super Holding BUMN: Studi Komparatif Danantara Indonesia, Temasek Holdings Singapura, dan 1MDB Malaysia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.8 (2025).
- Kimberly Baltzer-Jaray, "The Wesen of things, menurut Reinach", *Quaestiones disputatae* 4 (1), 2013.
- Lori Mcmillan, "The Business Judgement Rule As An Immunity Doctrine" *William & Mary Business Law Review.*, 4 (April 2013).
- M. McMullan, "A Theory of Corruption," *The Sociological Review*, Vol. 9, Issue 2 (1961): <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1961.tb01093.x>.
- Melcin Aron Eisenberg, "The Duty of Care of Corporate Directors and Officers," *University of Pittsburgh Law Review*, Vol. 51 (1990).
- Melvin A. Eisenberg, "The Duty of Care of Corporate Directors and Officers," dalam *The Law of Corporate Officers and Directors: Indemnification and Insurance* (New York: Law Journal Press, 2005), § 3.02[1]; lihat juga Melvin A. Eisenberg, "The Divergence of Standards of Conduct and

- Standards of Review in Corporate Law," *Fordham Law Review* 62, no. 3 (1993).
- Melvin Aron Eisenberg, "The Duty of Care of Corporate Directors and Officers," *University of Pittsburgh Law Review*, Vol. 51, No. 4, 1990, hlm.
- Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Bank Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2007.
- Oh, Kyung-sik. "The relationship between The Business Judgement Rule and the Malfeasance (경영판단의 원칙과 배임죄 성립여부에 대한 연구)." *Korean Journal of Comparative Criminal Law (비교형사법연구)* 15, no. 2 (2013): 261-282. DOI:10.23894/kjcccl.2013.15.2.010
- Permadi, Iwan, and Heru Ratno Hadi. "The legal protection weakness of the directors board from the risk of losses due to business decisions." *International Journal of Research in Business and Social Science* Vol. 10 Iss..2, (2021): DOI:10.20525/IJRBS.V10I2.1038.
- Rentsch, Carole, and Matthias Finger. "Yes, no, maybe: The ambiguous relationships between state-owned enterprises and the state." *Annals of Public and Cooperative Economics* 86.4 (2015): <https://doi.org/10.1111/apce.12096>.
- Robert C. Clark, *Corporate Law*, Little Brown and Company, Boston, 1986, hlm. 123-125. Lihat juga Dennis J. Block, Nancy E. Barton & Stephen A. Radin, *The Business Judgement Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 5th ed., Aspen Publishers, New York, 1998.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: KENCANA, 2016).

Rusyda, Muh Farhan Ar, and Trubus Rahardiansah. "Peran dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF)." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2.6 (2025).

Stephen M. Bainbridge, "The Business Judgement Rule as Abstention Doctrine," *Vanderbilt Law Review* 57, no. 1 (2004): 83-84, <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol57/iss1/3/>.

Sutan Remy Sjahdeini, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris", *jurnal Hukum Bisnis*, Vol.14, Juli, 2001.

Umam, Syamsul. "Ekonomi Pancasila di tengah arus kapitalisme pasar", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28.2 (2017): <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.491>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Perpu No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Permen BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN

Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan
Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN

Surat Edaran

SE MARI No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar
MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

SE Menteri BUMN No. SE-06/MBU/2006

SE Menteri BUMN No. SE-11/MBU/wk/2012 tentang Pemberian Persetujuan atau
Rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

SE Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN
Bersih

SE Menteri BUMN No. SE-02/MBU/2016 tentang Penegakan Citra BUMN

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK No. 002/PUU-I/2003

Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006

Putusan MK No. 36/PUU-X/2012

Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013

Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

Putusan MK No. 59/PUU-XVI/2018

Putusan MK No. 43/PUU-XXIII/2025

Putusan MK No. 123/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

Putusan MA No. 821K/Pid/2005

Putusan MA No. 1144 K/Pid/2006

Putusan MA No. 13 PK/Pid.Sus/2016

Putusan MA No. 121K/Pid.Sus/2020

Putusan PN Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst

Preseden Pengadilan Asing

Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805 (Del. 1984)

Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del. 1985)

Percy v. Millaudon (Louisiana, 1829)

Konvensi Internasional

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Berita

Adji Prakoso, "Indonesische Bedrijvenwet 1927: Sejarah Pengelolaan BUMN Era Hindia Belanda" *MARI News*, 21 Agustus 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/serba-serbi/sejarah-pengelolaan-bumn-era-hindia-belanda-0v1>. Diakses pada 23 Desember 2025.

Agus Eka Permana, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Memberikan Keadilan bagi Para Pelaku Korupsi di Indonesia," *Kompasiana*, 20 Juli 2025, <https://www.kompasiana.com/sukanulis2243/687d208fed641548e81b3f33/urgensi-pembaharuan-hukum-pidana-dalam-memberikan-keadilan-bagi-para-pelaku-korupsi-di-indonesia>.

Eka Kurnia Chrislianto, "Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Negara yang Wajib Kamu Ketahui," *Law Office & Legal Consultant*, 17 Juni 2025, Sejarah

Singkat Badan Usaha Milik Negara yang Wajib Kamu Ketahui. Diakses pada 21 Desember 2025.

In-House Community, "Preventing Allegations of Breach of Trust for Management Decisions in Korea," diakses 17 Februari 2026, <https://dev.inhousecommunity.com/article/preventing-allegations-breach-trust-management-decisions-korea/>.

IRMAPA, "PerMen BUMN Nomor Per-5/MBU/09/2022 tentang Manajemen Risiko pada BUMN," Oktober 2022. Diakses dari <https://irmapa.org>

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, "Garis Tipis Perdata-Pidana, KPK Ingatkan Batas Aman BJR di Sektor Swasta," 22 Januari 2026, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/garis-tipis-perdata-pidana-kpk-ingatkan-batas-aman-bjr-di-sektor-swasta>. Diakses 15 Februari.

Mahmudi, Ridewan. "Budaya Main Aman: Racun yang Memperlambat Transformasi BUMN", *Kompas.com*. Diakses pada 30 Januari 2026.

Nyoman Suarna, "Chandra Hamzah: Pasal Kerugian Negara di UU PTPK Perlu Dikaji Ulang," Bali Express (Jawa Pos Network), 18 September 2024, <https://baliexpress.jawapos.com/nasional/675102129/chandra-hamzah-pasal-kerugian-negara-di-uu-PTPK-perlu-dikaji-ulang?page=9>. Diakses pada 15 Februari 2026.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemasaran, dan Uang Pelicin." 09 Mei 2022, Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemasaran, dan Uang Pelicin - ACLC KPK, Diakses pada 23 Desember 2025.

Renata, “7 Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya,” *Hukum Online*, 1 April

2024, 7 Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya | Klinik Hukumonline.

Diakses pada 23 Desember 2025.

Kamus

Black’s Law Dictionary

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/delik>.